

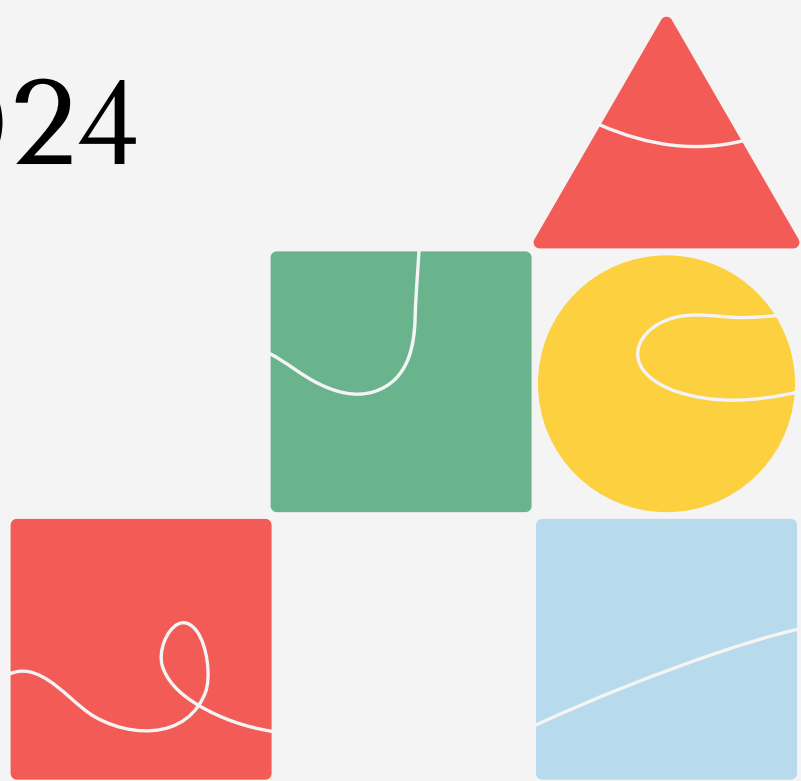
POHON

KINERJA

BADAN KESBANGPOL

TAHUN

2024



POHON KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

TAHUN 2024

KABUPATEN BONE

| | |
|---|--|
| KINERJA UTAMA (Ess. III) 1. Tervujudnya Penguatan Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol 2. Tervujudnya Stabilitas Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, dan Kesatuan Bangsa Dalam Kehidupan Masyarakat | INDIKATOR KINERJA UTAMA (Ess. III) 1. Hasil Evaluasi SAKIP Oleh APIP 2. Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Stabilitas Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Kesatuan Bangsa |
|---|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|--|--|--|--|--|--|---|--|---|--|--|
| Eselon III (Bidang Sekretariat) Kinerja Utama 1.1 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah berdasarkan jenis dokumen yang wajib disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 1.2 Terselenggaranya pelayanan administrasi keuangan pada perangkat daerah 1.3 Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.4 Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah 1.5 Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah 1.6 Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.7 Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan pada Perangkat Daerah 1.8 Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan dalam Kondisi Baik pada Perangkat Daerah Indikator Kinerja 1.1 Tingkat Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah 1.2 Persentase Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan Periodik Perangkat Daerah 1.3 Persentase Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.4 Persentase ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah 1.5 Persentase ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah 1.6 Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.7 Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan pada Perangkat Daerah 1.8 Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik pada Perangkat Daerah | Eselon III (Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa) Kinerja Utama 2.1 Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa Indikator Kinerja 2.1 Persentase Hasil Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa | Eselon III (Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat) Kinerja Utama Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Indikator Kinerja 3.1 Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 3.2 Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Eselon III (Bidang Politik Dalam Negeri) Kinerja Utama 4.1 Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Indikator Kinerja 4.1 Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | Eselon III (Bidang Kewaspadaan Nasional & Penanganan Konflik) Kinerja Utama 5.1 Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Indikator Kinerja 5.1 Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Eselon IV (Subag Program dan Anggaran) Kinerja Utama 1.1.1. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Eselon IV (Subag Keuangan) Kinerja Utama 1.1.1. Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Eselon IV (Subag Umum dan Kepegawaian) Kinerja Utama 1.1.1. Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1.1.12. Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Eselon IV (Subkoor Ideologi dan Wawasan Kebangsaan) Kinerja Utama 2.1.1 Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Eselon IV (Subkoor Pembauran Bangsa dan Pengembangan Budaya Bangsa) Kinerja Utama 2.2.1 Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Eselon IV (Subkoor Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Ormas) Kinerja Utama 3.1.1 Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan | Eselon IV (Subkoor Organisasi Kemasyarakatan) Kinerja Utama 3.2.1 Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Eselon IV (Subkoor Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi) Kinerja Utama 4.1.1 Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Eselon IV (Subkoor Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik) Kinerja Utama 4.2.1 Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Eselon IV (Subkoor Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen) Kinerja Utama 5.1.1 Tersusunnya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Eselon IV (Subkoor Penanganan Konflik) Kinerja Utama 5.2.1 Tersusunnya Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah |
|--|---|---|--|---|--|--|--|--|--|--|---|--|---|--|--|

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|---|--|---|--|--|
| 1.1.2. Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1.1.2. Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.1.2. Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1.1.3. Tersedianya Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan | 2.1.2 Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 2.2.2 Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 3.1.2 Tersusunnya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 3.2.2 Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 4.1.2 Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 4.2.2 Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 5.1.2 Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 5.2.2 Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota |
| 1.1.3. Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1.1.3. Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1.1.3. Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1.1.4. Tersedianya Mebel | 2.1.3 Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | 2.2.3 Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 3.1.3 Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 3.2.3 Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | 4.2.3 Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 5.1.3 Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | |
| 1.1.4. Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | | | 3.1.4 Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 3.2.4 Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Indikator Kinerja 4.1.1 Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun | | 5.1.4 Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Indikator Kinerja 5.2.2 Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun |
| 1.1.5. Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Indikator Kinerja 1.1.1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 1.1.4. Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1.1.15. Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Indikator Kinerja 2.1.1 Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun | Indikator Kinerja 2.2.1 Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun | 3.1.5 Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 3.2.5 Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 4.1.2 Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Indikator Kinerja | | 5.2.2 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota |
| | 1.1.2. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.1.5. Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 1.1.16. Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 2.1.2 Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 2.2.2 Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | | Indikator Kinerja 5.1.1 Jumlah Laporan Penyusunan Bahan Perumusan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun | |
| Indikator Kinerja 1.1.1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1.1.3. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1.1.6. Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1.1.17. Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 2.1.3 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayat dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | 2.2.3 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Indikator Kinerja 3.1.1 Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun | Indikator Kinerja 3.2.1 Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun | | 4.2.1 Jumlah Laporan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | 5.1.2 Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun | |

1.1.3. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

1.1.4. Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

1.1.5. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.1.7. Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

1.1.8. Tersedianya Bahan Logistik Kantor

1.1.9. Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan

1.1.10. Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1.1.11. Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu

Indikator Kinerja

1.1.1. Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

1.1.2. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

1.1.18. Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.1.19. Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.1.20. Terlaksananya Pemeliharaan Mebel

1.1.21. Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.1.22. Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

1.1.12. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.1.13. Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan

3.1.2. Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun

3.1.3. Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

3.1.4. Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

3.1.5. Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

3.2.2. Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun

3.2.3. Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

3.2.4. Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

3.2.5

Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

5.1.3. Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

5.1.4. Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

| | | | |
|---------|---|---------|--|
| 1.1.3. | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1.1.14. | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan |
| 1.1.4. | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawain | 1.1.15. | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan |
| 1.1.5. | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 1.1.16. | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan |
| 1.1.6. | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1.1.17. | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |
| 1.1.7. | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1.1.18. | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan |
| 1.1.8. | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1.1.19. | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya |
| 1.1.9. | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1.1.20. | Jumlah Mebel yang Dipelihara |
| 1.1.10. | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1.1.21. | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara |
| 1.1.11. | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | 1.1.21. | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi |